



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Ali Ahmad
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Madani Berkeadilan Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Madani Berkeadilan
Indonesia

Dedi Ali Ahmad
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Afif Abdul Qoyim
Jabatan : Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat



M. Afif Abdul Qoyim
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M.
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron
Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001



Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB DKI JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Amalia, S.H., M.H
Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia (PAHAM) Cab DKI Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Cab DKI Jakarta

Nurul Amalia, S.H., M.H
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA PUSAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hoirullah, S.Sy
Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Indonesia Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Indonesia Pusat



Hoirullah, S.Sy
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julius Ibrani
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum PBHI Nasional
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum PBHI Nasional



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Julius Ibrani
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN BANTUAN HUKUM PERJUANGAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budhi Benyamin Sembiring, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Perjuangan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Bantuan Hukum Perjuangan



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Budhi Benyamin Sembiring, SH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUM AAI DPC JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michael R Dotulong, SH, MH
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakum AAI DPC Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Posbakum AAI DPC Jakarta Timur

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Michael R Dotulong, SH, MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Afdal Zikri, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi
Syariah

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Drs. Afdal Zikri, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Abd. Rachman, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat
Indonesia

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

H. Abd. Rachman, SH., MH
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Kartika
Jabatan : Direktur/Ketua Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Dewi Kartika
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISIYIAH JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nevey Farida Ariani, SH., M.Hum
Jabatan : Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum(Posbakum)
Aisyiyah Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah
Jakarta



Nevey Farida Ariani, SH., M.Hum
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN
(LBH APIK) JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mazumah, S.HI
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan
Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Siti Mazumah, S.HI
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETHEL INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hanan Soeharto, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
Bethel Indonesia


Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001


Dr. Hanan Soeharto, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Sudjatmoko, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Agus Sudjatmoko, SH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Rizky Novandi Kusumah, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia



R. Rizky Novandi Kusumah, SH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yana Sukma Permana, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Konsultasi Citra Keadilan Indonesia

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Yana Sukma Permana, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA
(YLBHK-DKI) CABANG JAKARTA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Nasution, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia
(YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan




Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001


Muhammad Yusuf Nasution, SH
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA
(YLBHK-DKI)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toha Bintang.S.EL.Thamrin, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI)

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-
DKI)

Toha Bintang.S.EL.Thamrin, SH
Direktur/Ketua





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasimin
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya
Jakarta Timur



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Kasimin
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadi Syahroni, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia Paralegal Institut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.


Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Paralegal Institut


Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001


Hadi Syahroni, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LBH JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Maulana, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua LBH Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
LBH Jakarta

Arif Maulana, S.H., M.H.
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiansyah, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta

Hardiansyah, SH
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA JUSTICE
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Sari, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Justice
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Justice

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Sukma Sari, SH
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Andayani Sangadji, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum
Justitia 1979

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia
1979

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Tri Andayani Sangadji, SH
Direktur/Ketua
YAYASAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM
JUSTITIA 1979



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RECLASSEERING INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Lulang, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Reclasseering Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Reclasseering Indonesia


Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001


Achmad Lulang, S.H.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hechrin Purba, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
REKOR
METERAI
TEMPEL
457A4AJX709565975

Hechrin Purba, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan Frans Boy Lumban Raja
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila
Nusantara Cabang Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila
Nusantara Cabang Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Gunawan Frans Boy Lumban Raja
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA (LKBH FH UBHARA JAYA)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octo Iskandar, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (LKBH FH UBHARA JAYA)
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
(LKBH FH UBHARA JAYA)



Octo Iskandar, S.H., M.H.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfikar Judge, SH., M.Kn
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Esa Unggul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Esa Unggul

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Zulfikar Judge, SH., M.Kn
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M
Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional (UNAS)
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional
(UNAS)

Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum.,MPA
Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chaldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Ibnu Chaldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara



Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum.,MPA
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Heru Sugiyono, SH., MH
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001



Dr. Heru Sugiyono, SH., MH
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selamat Lumban Gaol, SH., M.Kn
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Selamat Lumban Gaol, SH., M.Kn
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dara Qudni, S.H
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Barat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Posbakumadin Jakarta Barat



Dara Qudni, S.H
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA PUSAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyudin, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Posbakumadin Jakarta Pusat

Wahyudin, S.H.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Nurullita, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Posbakumadin Jakarta Selatan

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001

Eva Nurullita, S.H.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahder Johan, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Jakarta, 22 Februari 2022
Pihak Kesatu,
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Jakarta Timur

Bahder Johan, SH
Direktur/Ketua





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ali Syaifudin, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Utara
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Pihak Kesatu,
Posbakumadin Jakarta Utara

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196603281988111001



Mohamad Ali Syaifudin, S.H.
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN PIMPINAN PUSAT)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halim Yeverson Rambe, SH
Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Pimpinan Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

Pihak Kesatu,
Posbakumadin Pimpinan Pusat

Halim Yeverson Rambe, SH
Direktur/Ketua